

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Media Sarana Press, 1987.
- Achmad KM, Mansyur and Baharuddin Zubakhrum Muhammad. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jombang: Askara Sastra Media, 2024.
- Adji Sayekti, Moh Rofii. *Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah*. Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Budiarjo Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Cheema, G. Shabbir and Rondinelli, Dennis A. *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publications, 1983.
- Cruz de, Peter. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law and Social Law*. Bandung: Nusa Media, 2014.

- Ekatjahjana, Widodo. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar dan Teknik Penyusunannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Haniatjo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.
- hidayat, Syarif and Hoessein Bhenyamin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dalam Paradigma Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: P2p-LIPI, 2001.
- HR, Syaukani eds. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset*, 2004.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Otonomi Daerah Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Isjwara, Fred. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Binacipta, 1974.
- Isra Saldi. *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

- Joeniarto. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Kelsen, Hans. *General Theory of law and state*. New York: Russell & Russell, 1961.
- \_\_\_\_\_. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Koesoemahatmadja, RDH. *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Binacipta: Bandung, 1979.
- Maddick, Henry. *Desentralisasi dalam Praktek*. Terj. Pustaka Kendi. Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2004.
- Marzuki Laica, M. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Depok: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Mochtar Arifin Zainal. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Muslimin, Amrah. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni, 1986.
- Mulkan, Hassanal and Aprita Serlika. *Hukum Otonomi Daerah*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2023.
- Nawiasky, Hans. *Allgemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grundbegriffe*. Einsiedeln: Benziger, 2021.
- Perviddy Solossa, Jacobus. *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*. Jakarta: Sinar Harapan, 2005.

- Riwu Kaho, Josef. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Setyawan Salam, Dharma. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Soejito, Irawan. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Stroink, F.A.M. *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, Terj. Ateng Syafrudin. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Tasrin, Krismiyati and eds. *Kajian Pengembangan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Bandung: Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara, 2012.
- Wastiono, sadu dan Polyando Petrus. *Politik Desentralisasi di Indonesia*. Bandung: IPDN Press, 2017.
- Wajong, J. *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Djambatan, 1975.
- Wasistiono, sadu and eds., *Memahami Asas Tugas Pembantuan*. Bandung: Fokusmedia, 2006.

## **B. Jurnal**

- Aisyah, Nur Siti dan Huda Ni'matul. "Penunjukkan Kepala Otorita Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022,". *Jurnal Prosiding Nasional Hukum Aktual*, 2023.

- A.Tauda, Gunawan. “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,”. *Administrative Law & Governance Journal*, 2018.
- Ahmadi dan Muhjad Hadin, M. “Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita dalam Ibu Kota Negara,”. *Jurnal Kewarganegaraan*, 2024.
- Baihaki, M.Reza. “Penjelasan Hukum (*restatement*) Kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Negara Menurut Hukum,”. *Majalah Hukum Nasional*, 2022.
- Darmawan, Dadang. “Problema Bangsa vs Desentralisasi (Tinjauan Tentang ‘Mentahnya’ Konsep Desentralisasi yang di Terapkan di Indonesia)”. Medan, Universitas Medan Area, 2009.
- Endi Jaweng, Robert. “Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia”. *Jurnal Analisis CSIS*. 2011.
- Mahmuzar. “Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi,”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2023.
- Nuradhwati, Rira. “Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia,”. *Jurnal Academia Praja*, 2019.
- Susanto Hari Nur, Sri. “etode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan,”. *Jurnal Administrative Law & Governance Journal*. 2020.

### **C. Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Aisyah, Siti Nur. “Penunjukkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara”. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Riyanto, Astim. “Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Bandung, Universitas Padjajaran, 2006.

Anwar Said, Syarif. “Kedudukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Lampung, Universitas Negeri Lampung, 2023.

Sufriadi. “Kedudukan Kepala Otorita dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam Sistem Pemerintahan Daerah”. Sumenep, Universitas Wiraraja, 2023.

Attamimi, Hamid. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”. Depok, Universitas Indonesia, 1990.

### **D. Seminar**

Hoessein, Benjamin “Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara”, dalam Seminar dan Lokakarya Nasional “Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dalam Kerangka *Good Governance*”,

diselenggarakan Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara Jakarta, 30 Oktober 2001.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

#### **F. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### **G. Internet**

Mahatma Chryshna. “Tahapan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.” *kompas pedia*, April 1, 2022.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Pemindahan Ibu Kota Di Hadapan Anggota Dewan.” Agustus 16, 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Februari 2025, [kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, Juni 2021.